



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jl. Semarang No. 5, Malang 65145 | Telp. (0341) 551312
<https://um.ac.id>

LAPORAN KEUANGAN

BA 139.03.693445

Untuk periode yang berakhir
30 Juni 2025



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Universitas Negeri Malang adalah entitas akuntansi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan *Universitas Negeri Malang* (139.03.693445) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada *Universitas Negeri Malang*. Di samping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Malang, 21 Juli 2025

Direktor,

Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

NIP 196312271988021001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Hal i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	49
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	52
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	54
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	56
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	57
G. Capaian Rincian Output	58
VI. Daftar Lampiran	59



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun 2025 Universitas Negeri Malang (139.03.693445) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Malang, 21 Juli 2025



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

NIP 196312271988021001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 23E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Universitas Negeri Malang menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan SAP Tahun 2025. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Tahun 2025 Universitas Negeri Malang (BA 139.03.693445) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp58.731.368,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp0,-.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp88.858.403.279,- atau mencapai 54,94 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp161.732.881.000,-.

Berdasarkan realisasi pendapatan Negara dan realisasi belanja Negara, terjadi defisit anggaran sebesar Rp(88.799.671.911),-.

Uraian	Realisasi Anggaran Tahun 2025			30-Jun-24
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan Negara	0	58.731.368		0
Belanja Negara	161.732.881.000	88.858.403.279	54,94	0
SILPA/SIKPA		-88.799.671.911		0

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp0,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp0,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp7.136.376.068,- dan Rp(7.136.376.068),-

Uraian	30 Juni 2025	31 Desember 2024
Aset		
Aset Lancar	-	-
Aset Tetap	-	-
Aset Lainnya	-	-
Total Aset	-	-
Kewajiban	7.136.376.068	-
Total kewajiban	7.136.376.068	-
Ekuitas	-7.136.376.068	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	-	-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh satker untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,- sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp95.238.644.347,- sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(95.238.644.347),-. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar surplus Rp58.731.368,- dan Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(95.179.912.979),-.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024
1	Pendapatan LO	0	0
2	Beban Operasional	95.238.644.347	0
3	Surplus (Defisit) dari kegiatan Non Operasional	58.731.368	0
4	Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa	0	
5	Surplus/(Defisit) LO	-95.179.912.979	0

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp(0),- ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp(95.179.912.979),- kemudian ditambah/dikurangi dengan penyesuaian nilai tahun berjalan senilai Rp0,-, dan transaksi antar entitas sebesar Rp88.043.536.911,- sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp(7.136.376.068),-.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024
1	Ekuitas Awal	0	0
2	Surplus/(Defisit) LO	-95.179.912.979	0
3	Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas	0	0
4	Transaksi antar entitas	88.043.536.911	0
5	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	-7.136.376.068	0
6	Ekuitas Akhir	-7.136.376.068	0

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan – pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan

Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2025		% thd Anng	30 Juni 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2	-	58.731.368		-
Jum Pendpt Negara & Hibah		-	58.731.368		-
BELANJA	B.3				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3.1	161.732.881.000	88.858.403.279	54,94	-
Belanja Barang		-	-		-
Belanja Modal		-	-		-
Jumlah Belanja Negara		161.732.881.000	88.858.403.279	54,94	-
SILPA/SIKPA			(88.799.671.911)		-

II. NERACA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NERACA
PER 30 JUNI 2025 dan 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Piutang Bukan Pajak	C.1	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
JUMLAH ASET		0	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2	7.136.376.068	-
JUMLAH KEWAJIBAN		7.136.376.068	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.3	(7.136.376.068)	-
JUMLAH EKUITAS		(7.136.376.068)	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-

III. LAPORAN OPERASIONAL

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	30 Juni 2025	30 Juni 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D1	-	-
Jumlah Pendapatan Operasional		-	-
BEBAN OPERASIONAL	D2		
Beban Pegawai	D.2.1	95.238.644.347	-
JUMLAH BEBAN		95.238.644.347	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(95.238.644.347)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D3		
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	D.3.1	58.731.368	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		58.731.368	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(95.179.912.979)	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(95.179.912.979)	-

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2025	31 Desember 2024
Ekuitas Awal	E.1	-	-
Surplus/Defisit LO	E.2	(95.179.912.979)	-
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.3	-	-
Jumlah Lain-lain		-	-
Transaksi Antar Entitas	E.4	88.043.536.911	-
Ekuitas Akhir	E.5	(7.136.376.068)	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. GAMBARAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG

A.1.1 Latar Belakang

Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Universitas Negeri Malang berawal dari Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) yang diresmikan pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 1954, oleh J.M. Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K), Mr. Muh. Yamin, dan J.M. Wakil Perdana Menteri RI, Zainul Arifin. Tempat peresmian di Aula SMA Tugu Malang dengan dihadiri para pejabat di kota Malang. Penetapan dibukanya PTPG terhitung sejak tanggal 1 September 1954 yang tertera dalam SK Menteri PP dan K tanggal 4 Agustus 1954 No. 33756/Kab. yang secara yuridis formal diatur dalam S.K. Menteri PP dan K tanggal 1 September 1954 No. 38742/Kab. Rektor pertama adalah Adam Bachtiar seorang kartografer yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai Penyelidik dan Perancangan Pendidikan dan pengajaran pada Kementrian PP dan K.

Pada awalnya PTPG di Malang mempunyai 5 jurusan dengan 127 mahasiswa yang meliputi (1) Jurusan Ilmu Bahasa dan Sastra Indonesia 20 orang, (2) Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris 25 orang, (3) Jurusan Sejarah/Budaya 19 orang, (4) Jurusan Ilmu Ekonomi 35 orang, dan (5) Jurusan Ilmu Pasti Alam 28 orang (18 orang untuk Ilmu Pasti dan 10 orang untuk Ilmu Hayat). Mahasiswa berasal dari berbagai provinsi di Indonesia dengan seleksi masuk yang sangat ketat.

Pada tanggal 1 November 1954 keluar peraturan pemerintah (PP) nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga (UNAIR). Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa PTPG di Malang menjadi bagian dari Universitas Airlangga Surabaya. Pada tahun 1958 keluar PP No. 71 tahun 1958 tentang perubahan PTPG menjadi "Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan" (FKIP) dengan status tetap menjadi bagian dari Universitas Airlangga. Pada tahun 1963 keluar kebijakan untuk menyatukan beberapa FKIP dan Institut Pendidikan Guru (IPG) menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP).

Pada hari Selasa, 20 Mei 1964, dilangsungkan Upacara Peresmian IKIP Malang yang berarti pula lepas dari Universitas Airlangga. IKIP Malang memiliki empat fakultas: (1) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), (2) Fakultas Keguruan Sastra dan Seni (FKSS), (3) Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS), dan (4) Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta (FKIE). Menteri PTIP pada tahun 1964 mengeluarkan SK nomor 35 tahun 1964 tentang cabang-cabang IKIP Malang yakni Surabaya, Madiun, Singaraja, Jember dan Kupang. Berdasar SK Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi nomor 176 tanggal 30 Desember 1967 IKIP Malang ditetapkan sebagai

IKIP

Pembina.

Seiring dengan dinamika sosial yang sangat pesat terjadi perubahan-perubahan kelembagaan dari IKIP Malang menjadi Universitas Negeri Malang (UM). Pada tanggal 4 Agustus 1999 lahir Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 yang ditandatangani Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas. Konsideran dari Kepres tersebut antara lain adalah upaya peningkatan mutu, relevansi, efisiensi, pemerataan dan akuntabilitas pendidikan tinggi secara nasional perlu ditingkatkan kinerjanya, khususnya menyangkut IKIP. Kepres tersebut secara formal menjadi dasar perubahan IKIP Malang menjadi Universitas Negeri Malang (UM). UM menerima perluasan mandat dengan tugas pokok yang diemban adalah menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu. Namun UM tetap mengemban tugas pokok mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan, serta mendidik tenaga akademik yang profesional dalam bidang kependidikan.

Pada tahun 2008, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 279/KMK.05/2008, UM ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) dengan status BLU penuh. Dengan sistem tata kelola ini, UM memiliki otonomi pengelolaan sumber daya keuangan yang lebih fleksibel, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Status BLU yang disandang UM saat ini diharapkan akan mampu menjadi landasan bagi perubahan UM yang mandiri. Dengan status BLU, UM dapat mengembangkan diri menjadi universitas yang unggul sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Pada masa yang akan datang, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan serta memperkuat kemandirian, UM mempersiapkan diri menuju status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sesuai dengan UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Jumlah fakultas di UM mengalami penambahan, menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Pada saat perluasan mandat tahun 1999 fakultas yang ada di UM meliputi (1) Fakultas Ilmu Pendidikan, (2) Fakultas Sastra, (3) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, (4) Fakultas Ekonomi, (5) Fakultas Teknik, dan Program Pascasarjana (PPs). Berdasarkan surat izin Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 846/D/T/2008 tanggal 13 Maret 2008 disetujui Pendirian Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK). Selanjutnya, berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1336/D/2009 tanggal 10 Agustus 2009 disetujui Pendirian Fakultas Ilmu Sosial (FIS). Jumlah fakultas di UM terus berkembang dengan adanya Surat Persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 58/E/C/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang pendirian Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi). Berdasarkan surat persetujuan tersebut, dikeluarkan SK Rektor nomor 141 tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang pendirian FPPsi. Dengan demikian, pada tahun 2014 UM telah memiliki delapan fakultas terdiri atas 29 Jurusan dan Pascasarjana, dengan rincian 70 program studi kependidikan (program sarjana 37, program magister 20, program doktor 13) dan 34 program non-kependidikan (program Diploma III 11, sarjana 20, dan magister 3). UM juga menyelenggarakan program-program khusus, antara lain Program Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Orang Asing, Kursus bahasa Inggris bagi yang akan melanjutkan studi keluar negeri (Predeparture English Training Course/PDETC), program penyetaraan D2, dan Penyetaraan D3.

Pada Tahun 2022 secara resmi Universitas Negeri Malang berubah status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6738).

A.1.2 Uraian Singkat Rencana Strategis Universitas Negeri Malang

Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan UM sebagaimana tercatum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang adalah sebagai berikut.

A. Visi

UM memiliki visi menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan humaniora.

B. Misi

UM memiliki misi:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul;
 - b. menyelenggarakan penelitian yang unggul untuk menghasilkan temuan baru dan bermanfaat bagi masyarakat; dan
 - c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
- di bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.

C. Tujuan

UM memiliki tujuan:

- a. menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesi, dan vokasi yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing global serta mampu berkembang secara profesional;
- b. menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif bereputasi internasional dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora; dan
- c. menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

D. Sasaran Strategis dan Bidang Pengembangan

Merujuk pada visi, misi, dan tujuan UM serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024, dalam kurun waktu 2022—2026 UM menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 10 bidang pengembangan yang dipaparkan pada tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Bidang Pengembangan UM 2022—2026

Sasaran Strategis	Bidang Pengembangan
1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran	Pendidikan dan Pembelajaran
2. Meningkatnya Kualitas Mahasiswa dan Lulusan	Kemahasiswaan dan Kealumnian
3. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Riset dan Inovasi
	Pengabdian kepada Masyarakat
4. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan	Organisasi dan Tata Kelola
	Sumber Daya Manusia
	Sumber Daya Keuangan
	Infrastruktur, Fasilitas, dan Lingkungan
	Teknologi dan Informasi
	Pengelolaan Usaha dan Dana Abadi

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, Renstra UM periode 2022—2026 adalah penjabaran lebih operasional Tahap I Rencana Induk Pengembangan (RIP) UM 2022—2041. Tahap I RIP UM 2022—2041 adalah Tahap Konsolidasi yang merupakan proses pemenuhan, penataan, dan penyelarasan sumber daya, sistem organisasi, tata kelola, dan infrastruktur perguruan tinggi untuk mencapai peringkat 13 Nasional, 300 Asia 1000 Global dan menjadi landasan tahap transformasi. Tema besar pengembangan UM 5 tahun ke depan adalah **"Konsolidasi Institusi Membangun Negeri"**.

Berikut adalah jabaran kebijakan, strategi, regulasi, dan kelembagaan dalam rangka mewujudkan berbagai indikator kinerja yang direncanakan dari setiap misi yang ditetapkan dalam Renstra UM 2022—2026. Masing-masing dijabarkan berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai pada setiap misi

A.1.3 Kebijakan, Strategi, Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

A. Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran) Bidang Pengembangan: Pendidikan dan Pembelajaran

Misi UM di bidang pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul. Unggul dan rujukan pada pengembangan pendidikan mengacu internasionalisasi program studi dan penguatan rekognisi akademik sehingga mahasiswa akan memiliki kompetensi akademik, vokasi, dan profesi yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing global, serta mampu berkembang secara profesional. Kecerdasan, religiusitas, akhlak mulia, serta mandiri ditumbuhkembangkan melalui penguatan pendidikan karakter, komitmen kebangsaan, toleransi dan moderat, employabilitas, dan kesadaran keberlanjutan lingkungan. Daya saing global ditumbuhkembangkan melalui penguatan pendidikan berstandar internasional. Kemampuan berkembang secara profesional dicapai melalui penguatan *learning skill* untuk memungkinkan mahasiswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sejalan dengan hal tersebut, UM bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, vokasi, dan profesi yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing global, serta mampu berkembang secara professional.

Pada tahap konsolidasi kegiatan bidang pendidikan difokuskan pada hal-hal berikut.

- a. Rekonstruksi kurikulum program studi mengacu pada prinsip integratif, kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan yang relevan dengan perkembangan ipteks sesuai dengan standar internasional.

- b. Reorganisasi sistem pengelolaan pendidikan yang mampu mengintegrasikan penyelenggaraan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler pada semua level melalui perumusan dan penetapan semua peraturan terkait penyelenggaraan pendidikan, peningkatan penjaminan mutu internal, perluasan kerjasama penyelenggaraan pendidikan, dan akreditasi nasional dan internasional.
- c. Penguatan sistem transfer alih kredit dan penyelenggaraan program *double degree* dengan universitas di dalam dan luar negeri.
- d. Peningkatan kompetensi dosen dalam penyelenggaraan pembelajaran yang inovatif dari aspek konten pembelajaran, pedagogis, dan digitalisasi pembelajaran agar mampu menyelenggarakan pembelajaran dan menghasilkan karya-karya pembelajaran yang berstandar internasional.
- e. Peningkatan ketersediaan dan kapasitas sarana prasarana khususnya pendukung perangkat digitalisasi pembelajaran, peralatan penunjang laboratorium/bengkel/workshop, dan sumber belajar untuk memfasilitasi mahasiswa domestik dan internasional.
- f. Pembukaan program studi dan program pendidikan nongelar baru yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja nasional dan global.
- g. Peningkatan inklusi dan aksesibilitas layanan pendidikan.

1. Kebijakan

- a. Kurikulum program studi yang selaras dengan perkembangan ipteks dan standar internasional harus sudah diimplemetasikan.
- b. Sistem pengelolaan pendidikan yang mampu mengintegrasikan penyelenggaraan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler harus sudah diimplemetasikan.
- c. Pembelajaran di dalam dan di luar kampus sudah harus berjalan lancar.
- d. Dosen dalam penyelenggaraan pembelajaran inovatif harus menghasilkan karya berstandar internasional.
- e. Sarana prasarana pendukung digitalisasi pembelajaran, peralatan penunjang laboratorium/bengkel/workshop, dan sumber belajar tersedia secara memadai.
- f. Sejumlah program studi dan program pendidikan nongelar baru yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja nasional dan global sudah mendapat pengakuan.

2. Strategi

- a. Mengevaluasi keterlaksanaan kurikulum secara periodik.
- b. Menyempurnakan kurikulum.
- c. Menjalani kerja sama dengan institusi lain di dalam dan luar negeri.
- d. Melakukan akreditasi nasional dan internasional.
- e. Menyusun aktivitas pembelajaran di dalam dan luar kampus secara terpadu.

- f. Meningkatkan kualitas pembelajaran di luar kampus.
- g. Melaporkan kegiatan pembelajaran dalam PDDikti secara berkala.
- h. Meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran.
- i. Meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran.
- j. Melakukan penjaminan mutu akademik dan melaporkannya secara berkala.

3. Regulasi

- a. Peraturan rektor tentang kurikulum
- b. Peraturan rektor tentang kerja sama
- c. Peraturan rektor tentang pembukaan program studi
- d. Peraturan rektor tentang pembukaan program pendidikan non-gelar
- e. Peraturan rektor pelatihan dosen
- f. Peraturan rektor tentang Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar

B. Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya Kualitas Mahasiswa dan Lulusan) Bidang Pengembangan: Kemahasiswaan dan Kealumnian

Pengembangan kemahasiswaan dan kealumnian merupakan bagian integral dari pembangunan pendidikan tinggi di UM. Pengembangan bidang kemahasiswaan mengacu pada berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, serta berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pimpinan UM sendiri. Selain pertimbangan regulasi, pengembangan bidang kemahasiswaan di UM juga mempertimbangan berbagai kondisi faktual terkait dengan dinamika masyarakat, dinamika kehidupan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi, serta dinamika kehidupan mahasiswa UM sendiri.

Memperhatikan beberapa butir pertimbangan di atas, dalam 5 tahun ke depan pengembangan kemahasiswaan dan kealumnian UM diarahkan pada hal-hal berikut.

- a. Pemetaan ulang terhadap potensi dan ragam kegiatan pengembangan kemahasiswaan baik dari sisi potensi mahasiswa, sarana dan prasarana pendukung, dosen pendamping kegiatan yang terintegrasi ke dalam *platform digital*.
- b. *Redesign* dan *reorientasi* sistem organisasi pusat karier sebagai wadah optimalisasi potensi mahasiswa hasil pemetaan, untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk kepentingan prestasi pada berbagai even lomba/kompetisi mahasiswa di segala bidang untuk meningkatkan posisi UM di antara perguruan tinggi negeri dan swasta secara nasional. Pada tahapan ini juga sudah dirintis keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai even kompetisi di tingkat Asia dan internasional.
- c. Pengembangan kemahasiswaan yang telah dikembangkan pada tahap pertama dengan fokus

meningkatkan tingkat keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengembangan kemahasiswaan, jumlah mahasiswa penerima beasiswa, perolehan medali pada berbagai kompetisi mahasiswa untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan posisi bidang kemahasiswaan UM di tingkat nasional dan Asia.

- d. Perluasan jaringan kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta untuk memperluas peluang kerja lulusan. Kerjasama dengan pihak dunia usaha dan industri juga semakin mapan untuk penyiapan dan pendampingan mahasiswa UM menjadi calon wirausaha. Kerjasama dengan pihak praktisi usaha dan perbankan juga harus dimantapkan untuk melakukan pendampingan dan permodalan kepada para lulusan UM yang sedang melakukan rintisan usaha.
- e. Memperkuat kegiatan kemahasiswaan ke luar kampus untuk melatih mahasiswa membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat. Kegiatan ini harus dirancang secara komprehensif agar sekaligus bisa menjadi bagian dari citra UM di masyarakat. Membangun desa binaan, daerah wisata binaan, dan gerakan UM mengajar, dengan konsep yang komprehensif adalah beberapa contoh yang bisa dikerjakan

1. Kebijakan

- a. Fasilitasi lulusan untuk memperoleh akses pekerjaan harus sudah dilakukan.
- b. Fasilitasi lulusan untuk studi lanjut harus sudah dilakukan.
- c. Fasilitasi mahasiswa untuk memiliki keterampilan wirausaha harus sudah dilakukan.
- d. Fasilitasi mahasiswa memperoleh pengalaman belajar di luar kampus harus sudah dilakukan.
- e. Fasilitasi pengembangan potensi penalaran, minat, dan bakat mahasiswa dalam meraih prestasi minimal tingkat nasional harus sudah dilakukan.
- f. Memperkuat pemberdayaan alumni harus sudah dilakukan.

2. Strategi

- a. Memantapkan tim pengembang bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat dan kegemaran, kesejahteraan, kepemimpinan, dan kepedulian sosial, baik tingkat universitas maupun tingkat fakultas.
- b. Membentuk unit pusat karier.
- c. Mengembangkan sertifikasi kompetensi mahasiswa.
- d. Mengembangkan program pembinaan mahasiswa berwirausaha.
- e. Membentuk tim evaluasi pemantapan kelembagaan kemahasiswaan.
- f. Memantapkan peran Ikatan Alumni (IKA) UM dalam pengembangan institusi.

3. Regulasi

- a. Peraturan Rektor tentang Standar Kemahasiswaan dan Alumni UM.

- b. Peraturan Rektor tentang Gerakan Mahasiswa Satu Karya dalam Satu Tahun (GEMAKARSATA) UM.
- c. Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan sertifikasi mahasiswa.

C. Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)

Bidang Pengembangan: Riset dan Inovasi

Sesuai dengan amanat RIP UM 2022—2041, pengembangan riset dan inovasi diarahkan pada kontribusi penyelesaian permasalahan di masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Luasan kontribusi tersebut akan berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas rekognisi hasil-hasil riset dan inovasi, berpotensi meningkatkan *income generating* bagi UM, serta memperkuat kemutakhiran referensi akademik berbasis hasil riset dan inovasi.

Karena itu, perencanaan dan implementasi riset UM perlu terus mengakselerasi perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir, tepat guna, serta menghasilkan terobosan produk inovasi berorientasi global, terutama dalam konteks tantangan VUCA (Volatile, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity) menandai ciri era industri 4.0 sebagai pijakan. Upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dilakukan secara kolaboratif berbasis multihelix, multilayer, dan multidisiplin dalam skala nasional, dan global, baik dalam konteks tema, kerjasama, hingga pendanaan. Penelitian di UM merupakan bagian penting bagi internasionalisasi berkelanjutan dengan mendukung dan menguatkan berbagai kebijakan nasional dan global, seperti kebijakan SNP tentang kompetensi multilevel, *Sustainable Development Goals (SDGs)*, *Millenium Development Goals (MDGs)*, serta pemanfaatan dan pengembangan hasil-hasil riset strategis lainnya. Tahap ini adalah tahap pemanfaatan dan pengembangan hasil riset dan inovasi yang sedang berjalan agar semakin mampu berinteraksi langsung dengan pemerintah, dunia industri, dan masyarakat.

1. Kebijakan

- a. Penguatan riset multi/inter/transdisiplin dan publikasi (HKI, paten).
- b. Penguatan etika riset dan integritas penelitian.
- c. Penguatan peran *Research Centers of Excellence* di bidang inovasi.
- d. Penguatan keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam jejaring (*network*) penelitian inter/trans/multidisiplin di tingkat nasional maupun internasional.

2. Strategi

- a. Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas peneliti, baik dari unsur dosen maupun tenaga kependidikan.

- b. Menyediakan berbagai skema, sarana, dan prasarana riset dan inovasi.
- c. Meningkatkan jumlah jurnal terakreditasi.
- d. Meningkatkan peringkat akreditasi jurnal.
- e. Meningkatkan penjaminan mutu pelaksanaan riset dan inovasi.
- f. Memperkuat peran lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan produk unggulan hasil riset dan inovasi.
- g. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dan mitra (dalam dan luar negeri) ke dalam seluruh proses riset dan inovasi.

3. Regulasi

- a. Peraturan Rektor tentang Pedoman Penelitian.
- b. Peraturan Rektor tentang pengelolaan jurnal ilmiah.
- c. Peraturan Rektor tentang kolaborasi riset dan inovasi internal, nasional, dan internasional.
- d. Peraturan Rektor tentang hibah riset dan inovasi internal UM

Bidang Pengembangan: Pengabdian kepada Masyarakat

Pada masa tahapan konsolidasi ini UM memusatkan perhatian pada usaha memetakan seluruh aktivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pemetaan tersebut dilakukan dalam rangka mengidentifikasi tema-tema dan kelompok unggulan pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan konsep penguatan citra UM sebagai pusat inovasi belajar dan mitra andal program pencapaian *SDGs*. Aktivitas yang juga mendapatkan perhatian dalam masa tahap konsolidasi adalah memetakan potensi sumber daya UM dan jejaring kemitraan untuk memastikan keberlanjutan eksekusi jangka panjang tema-tema unggulan pengabdian kepada masyarakat. Seluruh pilihan aktivitas konsolidasi tersebut mempersyaratkan partisipasi aktif seluruh sivitas UM.

Penguatan bidang pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan: (1) Penguatan kebijakan dan sistem tata kelola bidang pengabdian kepada masyarakat; (2) Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan seluruh elemen *pentahelix* baik dengan mitra dalam negeri maupun melakukan inisiasi dengan mitra luar negeri; (3) Integrasi program pendidikan dan penelitian dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat sesuai hasil konsolidasi; (4) Pengembangan tema unggulan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis inovasi belajar dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan; (5) Peningkatan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat baik melalui jalur publikasi ilmiah maupun publikasi populer.

1. Kebijakan

- a. Penguatan kebijakan dan sistem tata kelola bidang pengabdian kepada masyarakat.

- b. Peningkatan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat baik melalui jalur publikasi ilmiah maupun publikasi populer.
- c. Pengembangan tema unggulan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis inovasi belajar.

2. Strategi

- a. Memetakan potensi sumber daya UM dan jejaring kemitraan untuk memastikan keberlanjutan eksekusi jangka panjang tema-tema unggulan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Memperkuat kebijakan dan sistem tata kelola bidang pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan seluruh elemen *multihelix* baik dengan mitra dalam negeri maupun melakukan inisiasi dengan mitra luar negeri.
- d. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.
- e. Meningkatkan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat baik melalui jalur publikasi ilmiah maupun publikasi populer.
- f. Mengembangkan tema unggulan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis inovasi belajar dan *social entrepreneurship*.

3. Regulasi

- a. Peraturan Rektor tentang Sistem Tata Kelola pengabdian kepada masyarakat.
- b. Peraturan Rektor tentang Tema Unggulan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Peraturan Rektor tentang Kerjasama pengabdian kepada masyarakat di level internasional

D. Sasaran Strategis 4 (Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan)

Sasaran strategis 4 pada tahap konsolidasi ini diorientasikan pada penguatan tata kelola universitas sesuai prinsip *Good University Governance* (GUG) yang dititikberatkan pada:

- a. Penguatan visi dan misi UM menjadi visi dan misi seluruh *stakeholder*.
- b. Pembentukan dan penguatan organ-organ UM (Majelis Wali Amanat/MWA, Rektor, Senat Akademik Universitas/SAU), unit kerja (Sekretaris, Direktorat, Lembaga, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Departemen) dan unsurnya sesuai statuta UM.
- c. Penguatan sistem tata kelola (proses dan prosedur kerja) yang efektif, efisien, dan terukur meliputi semua organ beserta unsurnya.
- d. Penguatan sistem peraturan (regulasi) sehingga lebih komprehensif, tidak tumpang tindih, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, dan dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif di setiap level unit kerja.
- e. Penyempurnaan sistem penjaminan mutu dan pengawasan yang berbasis evaluasi diri, data, dan partisipatif.

- f. Penguatan sistem layanan publik yang lebih andal sehingga mampu menghadirkan kepuasan pemangku kepentingan terhadap kualitas kinerja dan layanan UM.
- g. Penyempurnaan *grand design* pengembangan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu untuk mendukung efektivitas dan efisiensi yang mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.
- h. Utilisasi sistem informasi yang integratif untuk mewujudkan tata kelola UM yang modern, efektif, efisien, akuntabel, dan dinamis
- i. Optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan asset dalam rangka mendukung peningkatan *income generating* UM.

Bidang Pengembangan: Organisasi dan Tata Kelola

1. Kebijakan

- a. Organisasi dan tata kerja kelembagaan sebagaimana yang tertuang dalam PP 115 tahun 2021 harus sudah disusun dan ditetapkan.
- b. Seluruh peraturan yang ditetapkan oleh MWA, Rektor, dan SAU harus sudah disusun dan diimplementasikan sesuai dengan amanat PP 115 tahun 2021.
- c. Sinkronisasi antara rencana jangka panjang (RIP), jangka menengah (Renstra), dan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) harus didukung dengan sistem informasi komunikasi yang terintegrasi berbasis Artificial Intelligence (AI).
- d. Laporan akuntabilitas publik, yang meliputi laporan akademik dan nonakademik harus disusun berdasarkan data yang komprehensif dan dilaporkan tepat waktu.

2. Strategi

- a. Menata seluruh organ kelembagaan dalam organisasi dan tata kerja.
- b. Menyusun seluruh peraturan MWA sesuai amanat PP 115 tahun 2021.
- c. Menyusun seluruh peraturan Rektor sesuai amanat PP 115 tahun 2021.
- d. Menyusun seluruh peraturan SAU sesuai amanat PP 115 tahun 2021.
- e. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi perencanaan yang integratif berbasis AI.
- f. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan rencana jangka menengah.
- g. Melakukan penjaminan mutu nonakademik dan melaporkannya secara berkala.

3. Regulasi

- a. Peraturan MWA tentang Organisasi dan Tata Kerja antarorgan.
- b. Peraturan MWA tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Audit (KA).
- c. Peraturan MWA tentang ketentuan pelaporan.

- d. Peraturan Rektor tentang Pedoman pelaksanaan tugas wakil Rektor dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian wakil Rektor.
- e. Peraturan Rektor tentang Pedoman tentang syarat, tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian, serta tugas Dekan dan wakil Dekan
- f. Peraturan Rektor tentang Ketentuan mengenai direktur, wakil direktur, dan Program Studi.
- g. Peraturan Rektor tentang ketentuan mengenai unsur penunjang akademik dan non akademik.
- h. Peraturan Rektor tentang ketentuan unsur pelaksana penjaminan mutu.
- i. Peraturan Rektor tentang ketentuan unsur pelaksana administrasi.
- j. Peraturan Rektor tentang ketentuan unsur pelaksana pengawasan internal.

Bidang Pengembangan: Sumber Daya Manusia

1. Kebijakan

- a. Pemetaan kompetensi SDM harus sudah dilakukan sebagai dasar penempatan posisi tugas/jabatan dan rencana pengembangan SDM.
- b. Setiap dosen dan tenaga kependidikan wajib memiliki akun yang terkait dengan pengembangan karir dan pengukuran kinerja.

2. Strategi

- a. Melakukan pemetaan kompetensi SDM, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kebutuhan SDM.
- b. Menyusun rencana pengembangan SDM berdasarkan hasil pemetaan dan analisis kebutuhan.
- c. Memfasilitasi seluruh tenaga kependidikan dalam membuat dan mengoptimalkan akun pengembangan karir dan pengukuran kinerja.

3. Regulasi

- a. Peraturan Rektor tentang Rencana Pengembangan SDM.
- b. Peraturan Rektor tentang tata cara rekrutmen, pembinaan karir, dan pemberhentian pegawai yang diangkat oleh Rektor.
- c. Peraturan Rektor tentang manajemen kepegawaian.

Bidang Pengembangan: Sumber Daya Keuangan

1. Kebijakan

- a. Keuangan yang bersumber dari APBN harus dikelola dengan maksimal.

- b. Keuangan yang bersumber dari non APBN harus dikelola sesuai dengan prioritas program.
- c. Pengelolaan keuangan harus didukung dengan sistem informasi manajemen keuangan terpadu.

2. Strategi

- a. Optimalisasi pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN dan non APBN.
- b. Pengelolaan hasil usaha dan dana abadi sebagai penopang operasional UM.
- c. Pengembangan sistem informasi manajemen keuangan terpadu.

3. Regulasi

- a. Peraturan Rektor tentang ketentuan mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan keuangan dalam lingkup UM.
- b. Peraturan Rektor tentang ketentuan pengelolaan dana UM.

Bidang Pengembangan: Infrastruktur, Fasilitas, dan Lingkungan

1. Kebijakan

- a. Peningkatan ketersediaan dan kapasitas sarana prasarana khususnya pendukung perangkat digitalisasi pembelajaran dan peralatan penunjang tridharma.
- b. Peningkatan pengelolaan sarana-prasarana/infrastruktur berbasis AI.
- c. Peningkatan kualitas lingkungan akademik yang kondusif.

2. Strategi

- a. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi berbasis AI.
- b. Mengembangkan layanan penggunaan fasilitas dan infrastruktur yang efisien.
- c. Mengembangkan lingkungan akademik yang kondusif bagi implementasi pendidikan karakter.

3. Regulasi

- a. Peraturan Rektor tentang ketentuan pengelolaan kekayaan UM.
- b. Peraturan Rektor tentang ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Bidang Pengembangan: Informasi dan Teknologi

1. Kebijakan

- a. Cetak biru *Enterprise Architecture* harus menjadi acuan utama pengembangan seluruh sistem teknologi informasi di lingkungan UM.

- b. Standar spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak pendukung teknologi informasi harus ditetapkan.
- c. Infrastruktur pendukung teknologi informasi dan komunikasi harus sesuai dengan standar.

2. Strategi

- a. Menyusun cetak biru *Enterprise Architecture* (EA) dan melakukan penyesuaian resiprokal dengan sistem yang telah, sedang, dan akan dibangun.
- b. Menyusun spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak pendukung teknologi informasi.
- c. Merekonstruksi pengelolaan sistem informasi sehingga menjadi integratif dan menghasilkan pangkalan data yang mendukung penuh penyelenggaraan tata kelola organisasi secara efektif dan efisien.
- d. Menyusun peta jalan pengembangan produk inovasi pendidikan dan pembelajaran berbasis teknologi informasi yang saling sejalan dengan cetak biru EA UM.

3. Regulasi

Peraturan Rektor tentang Standar Minimal Layanan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bidang Pengembangan: Pengelolaan Usaha Dan Dana Abadi

1. Kebijakan

- a. Unit usaha berbadan hukum yang menjadi entitas terpisah dari badan hukum UM harus didirikan.
- b. Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya sebagai *income generating* bagi UM.

2. Strategi

- a. Mendirikan unit usaha berbadan hukum yang menjadi entitas terpisah dari UM
- b. Mendirikan *holding company* yang mendukung peningkatan produktivitas unit usaha
- c. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder eksternal dalam rangka perolehan dan pengelolaan dana abadi.

3. Regulasi

- a. Peraturan MWA tentang investasi.
- b. Ketentuan mengenai pengelolaan kekayaan UM.

E. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis tersebut dipaparkan dalam Gambar 3.1 berikut.



A.1.4 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2022—2026, maka ditetapkan pula Indikator Kinerja untuk menggambarkan tingkat ketercapaian indikator tersebut. Secara lebih rinci indikator kinerja UM dan target yang akan dicapai pada periode 2022—2026, diuraikan sebagai berikut.

A. Indikator Kinerja Utama

Mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi negeri sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020, UM menetapkan IKU dan target IKU tahun 2022—2026 yang dipaparkan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Target IKU Tahun 2022—2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2021	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	39,42	50	60	80	80	80
2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi minimal tingkat nasional.	%	14,73	20	25	30	35	40
3	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS 100 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS100 by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	58,34	60	65	70	75	80
4	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	48,51	50	55	60	65	70
5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Rasio	7	7,01	7,1	7,15	7,25	7,5
6	Persentase program studi S1 dan D3/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	46,48	100	100	100	100	100
7	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>)	%	42,40	55	60	65	70	75

	sebagai sebagian bobot evaluasi							
8	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	18,57	35	50	55	60	65
9	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Kategori	BB	BB	A	A	A	A
10	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	Nilai	83	83,5	84	84,5	85	85

B. Indikator Kinerja

Selain IKU sebagaimana tersebut di atas, ditetapkan pula indikator dan target capaiannya pada setiap Sasaran Strategis dan Bidang Pengembangannya selama 5 tahun ke depan, sebagaimana dipaparkan pada Tabel 4.2a, 4.2b, 4.2c, dan 4.2d berikut ini.

Tabel 4.2a Target Kinerja Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya kualitas pendidikan dan pembelajaran)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2021	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran							
1	Persentase prodi yang menjalin kerjasama *)	%	46,48	100	100	100	100	100
2	Persentase matakuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi *)	%	42,40	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
3	Persentase program studi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah dan masih berlaku pada tahun berjalan *)	%	18,57	24,29	50,00	55,00	60,00	65,00
4	Persentase program studi yang memiliki akreditasi A atau unggul	%	62,5	65	67,5	70	72,5	75
5	Jumlah program studi baru yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja nasional dan global	prodi	0	5	10	14	18	23
6	Jumlah Fakultas dan Sekolah yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja nasional dan global.	Fakultas dan Sekolah	9	10	10	11	11	11

Keterangan: *) Indikator Jabaran Rinci IKU

Tabel 4.2b Target Kinerja Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya kualitas mahasiswa dan lulusan)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2021	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Kealumnian							
1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang langsung bekerja *)	%	22,10	29,10	36,15	49,39	49,39	49,39
2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang melanjutkan studi *)	%	8,63	10,84	12,55	16,33	16,33	16,33
3	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menjadi wiraswasta *)	%	8,70	10,06	11,30	14,29	14,29	14,29
4	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus *)	%	10,71	16,5	21	25,5	30	34,5
5	Persentase mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional *)	%	4,02	4,5	5	5,5	6	6,5
6	Jumlah prestasi dan rekognisi mahasiswa paling rendah tingkat nasional *)	prestasi/ rekognisi	2500	2600	2700	2800	2900	3000
7	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	%	17,35	24,5	38,75	45,5	52,25	60,5
8	IPK Lulusan	IPK	3,48	3,49	3,50	3,51	3,52	3,53
9	Jumlah mahasiswa asing (program gelar)	orang	41	170	250	300	325	350
10	Jumlah mahasiswa asing (program nongelar)	orang	1929	1100	1200	1300	1400	1500
11	Jumlah mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa outbound ke PT luar negeri pada tahun berjalan	mahasiswa	350	358	361	364	367	370
12	Rasio mahasiswa program Diploma dan Sarjana terhadap mahasiswa program Magister dan Doktoral	rasio	8 : 1	8 : 1,2	8 : 1,4	8 : 1,6	8 : 1,8	8 : 2
13	Persentase mahasiswa penerima beasiswa	%	20	20	20	20	20	20
14	Jumlah cabang IKA	cabang	40	60	80	100	110	120
15	Jumlah Perusahaan yang berpartisipasi dalam job fair	perusahaan	15	20	25	30	35	40

Keterangan: *) Indikator Jabaran Rinci IKU

Tabel 4.2c Target Kinerja Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2021	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Bidang Pengembangan Riset dan Inovasi							
1	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks selain WoS atau Scopus pada tahun berjalan.	judul	353	800	820	840	860	880
2	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks WoS atau Scopus pada tahun berjalan.	judul	133	200	225	250	275	300

No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2021	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
3	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding internasional terindeks Scopus pada tahun berjalan.	judul	542	800	815	820	825	830
4	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding internasional terindeks selain WoS dan Scopus pada tahun berjalan.	judul	680	700	705	710	715	720
5	Jumlah luaran penelitian berupa karya terapan atau karya seni pada tahun berjalan	judul	350	600	605	610	615	620
6	Jumlah dosen asing yang aktif melaksanakan kegiatan tridharma di lingkungan UMPada tahun berjalan	dosen	39	42	50	70	90	100
7	Rerata sitasi Scopus tiga tahun terakhir per dosen	rasio	7,33	7,53	7,73	7,93	8,13	8,33
8	Rerata sitasi Scopus tiga tahun terakhir per artikel	rasio	1,85	2,00	2,15	2,30	2,50	2,90
9	Jumlah publikasi karya ilmiah terindeks Scopus yang dihasilkan dari kolaborasi dengan peneliti asing pada tahun berjalan	judul	150	160	170	180	190	200
10	Jumlah keluaran penelitian (kumulatif) yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen *)	rasio	5 : 1	5,01 : 1	5,1 : 1	5,15 : 1	5,25 : 1	5,5 : 1
11	Jumlah produk inovasi atau prototipe industri yang dihasilkan pada tahun berjalan	produk	5	6	7	8	9	10
12	Rasio jumlah dosen dan jumlah judul kegiatan penelitian yang dilaksanakan pada tahun berjalan	rasio	1 : 1,5	1 : 1,6	1 : 1,7	1 : 1,8	1 : 1,9	1 : 2
13	Rasio jumlah dosen dan jumlah judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	rasio	1 : 0,5	1 : 0,6	1 : 0,7	1 : 0,8	1 : 0,9	1 : 1
Bidang Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat								
14	Jumlah kemitraan dengan seluruh elemen <i>multi</i> level baik dengan mitra dalam negeri maupun melakukan inisiasi dengan mitra luar negeri	TA	975	1.000	1.025	1.050	1.075	1.100
15	Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan atas integrasi program pendidikan dan penelitian	kegiatan	n.a	100	150	200	250	300
16	Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat	artikel	684	700	750	800	850	900
17	Jumlah keluaran pengabdian (kumulatif) kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen *)	rasio	2 : 1	2,01 : 1	2,1 : 1	2,15 : 1	2,25 : 1	2,5 : 1
18	Jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat berupa karya terapan atau karya seni pada tahun berjalan	karya	150	200	205	210	215	220

Keterangan: *) Indikator Jabaran Rinci IKU

Tabel 4.2d Target Kinerja Sasaran Strategis 4 (Meningkatnya kualitas manajemen dan tata kelola kelembagaan)

No	Indikator	Satuan	Baseline 2021	2022	2023	Target UM 2024	2025	2026
Bidang Pengembangan Organisasi dan Tatakelola								
1	Jumlah dokumen Peraturan Rektor	dokumen	n.a	20	35	70	100	150
2	Jumlah dokumen Peraturan MWA	dokumen	n.a	8	12	15	17	20
3	Jumlah dokumen Peraturan SAU	dokumen	n.a	2	3	4	5	6
4	Jumlah aplikasi sistem informasi dan komunikasi perencanaan integratif berbasis AI	aplikasi	n.a	1	1	1	1	1
5	Jumlah dokumen rencana strategis dasar penilaian kinerja pimpinan unit kerja	dokumen	11	11	12	12	13	13
6	Laporan akuntabilitas	dokumen	1	1	1	1	1	1
7	Jumlah program kegiatan per SDGs	kegiatan	n.a	2	3	4	5	6
8	Jumlah kerja sama dengan perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 100 QSWURby Subjects</i>	kerja sama (MOA)	16	25	35	45	55	65
9	Jumlah mitra DU/DI yang memiliki perjanjian kerjasama yang masih aktif sampai akhir tahun berjalan.	institusi	108	125	130	131	132	133
10	Jumlah mitra institusi luar negeri yang memiliki perjanjian kerjasama yang masih aktif sampai akhir tahun berjalan.	institusi	22	25	35	45	55	65
11	Jumlah mitra kementerian/lembaga pemerintah dan penda yang memiliki perjanjian kerjasama yang masih aktif pada tahun berjalan.	institusi	54	125	150	155	160	165
12	Jumlah mitra perguruan tinggi yang memiliki perjanjian kerjasama yang masih aktif sampai akhir tahun berjalan.	institusi	58	60	62	64	66	68
13	Jumlah kolega eksternal dosen yang memberikan respon positif pada survei reputasi akademik/pembelajaran/penelitian.	orang	n.a	400	425	450	475	500
14	Jumlah kolega sejawat alumni yang memberikan respon positif pada survei kualitas kerja lulusan.	orang	n.a	400	425	450	475	500
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia								
15	Dokumen peta kompetensi, analisis jabatan, analisis beban kerja dan kebutuhan SDM sesuai dengan tuntutan terkini	dokumen	1	1	1	1	1	1
16	Persentase tenaga kependidikan dengan kualifikasi kompetensi sesuai dengan tuntutan bidang pekerjaan	%	80	85	90	100	100	100
17	Dokumen Rencana Pengembangan SDM 2022-2026	dokumen	n.a	1	1	1	1	1
18	Persentase dosen yang memiliki kelengkapan data di akun pengembang karir	%	n.a	75	90	100	100	100
19	Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kelengkapan data pada akun pengembang karir	%	n.a	30	40	50	60	70
20	Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir *)	%	20	25	30	35	40	45
Target UM 2024								
No	Indikator	Satuan	Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
21	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain dalam 5 (lima) tahun terakhir *)	%	10	15	20	25	30	35

22	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) dalam 5 (lima) tahun terakhir*)	%	10	15	20	25	30	35
23	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir*)	%	20	25	30	35	40	45
24	Persentase dosen tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja*)	%	5	6	7	8	9	10
25	Persentase dosen tetap berkegiatan S2 yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja*)	%	20	22	24	26	28	30
26	Persentase dosen berkegiatan S3*)	%	40	43	45	48	50	55
27	Rasio jumlah dosen dan jumlah HKI yang granted pada tahun berjalan*)	HKI	1 : 1	1 : 1	1 : 1,5	1 : 2	1 : 2	1 : 2
28	Jumlah akademisi/peneliti (bukan dosen tetap UM) yang mengajar atau melakukan penelitian secara aktif di UMPada tahun berjalan	orang	n.a	238	270	300	330	360
29	Jumlah dosen asing yang aktif melaksanakan kegiatan tridharma di lingkungan UMPada tahun berjalan	dosen	15	50	65	80	100	120
Bidang Pengembangan Sumber Daya Keuangan								
30	Opini KAPatas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31	Persentase implementasi sistem keuangan yang terintegrasi dari perencanaan, penggunaan, dan pelaporan	%	30	80	90	100	100	100
32	Persentase implementasi sistem pengawasan, revisi dan audit keuangan dan aset yang terintegrasi	%	20	50	60	80	100	100
33	Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK	%	100	100	100	100	100	100
34	Jumlah pendapatan Non APBN	milyar rupiah	424,95	436,64	455,92	484,56	519,11	564,55
Bidang Pengembangan Infrastruktur, Fasilitas, dan Lingkungan								
35	Persentase implementasi sistem pengelolaan aset dan infrastruktur yang terintegrasi	%	20	50	60	80	100	100
36	UI Green Metric rank		26	23	20	18	16	15
37	Nilai rupiah pendapatan unit kerja UM yang bersumber dari hasil kerjasama dengan unit bisnis UM atau institusi swasta/industri	milyar rupiah	43,51	44,38	45,26	46,62	48,02	49,46
38	Nilai rupiah pendanaan dari pihak luar UM yang digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi pada tahun berjalan	milyar rupiah	n.a	1	1,5	2	2,5	3
39	Nilai rupiah pendanaan dari pihak swasta/industri untuk pengembangan dan komersialisasi prototipe industri/produk inovasi	juta rupiah	n.a	100	150	200	250	300
No	Indikator	Satuan	Baseline 2021	2022	2023	target UM		
						2024	2025	2026
Bidang Pengembangan Informasi dan Teknologi								
40	Persentase Implementasi Cetak Biru Enterprise Architecture UM	%	n.a	50	100	100	100	100
41	Persentase implementasi standar spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak pendukung teknologi informasi	%	n.a	50	70	90	100	100
42	Persentase sistem informasi yang terintegrasi dengan pusat pangkalan data kementerian	%	n.a	50	65	80	90	100

43	Persentase kesesuaian infrastruktur pendukung teknologi informasi dan komunikasi dengan standar.	%	n.a	50	70	90	100	100
Bidang Pengembangan Pengelolaan Usaha dan Dana Abadi								
44	Pendapatan usaha dari pengembangan sumber daya	milyar rupiah	14	15	16	17	18	19
45	Satuan usaha yang berbadan hukum	unit	n.a	1	2	3	4	5
46	Dana abadi yang dikelola oleh BPUDA	milyar rupiah	n.a	10	12	14	17	20

C. Rencana Sumber Pendanaan

Sumber pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran pada setiap sasaran strategis kurun waktu tahun 2022—2026 dipaparkan pada Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3 Rencana Sumber Pembiayaan

No.	Sumber Pembiayaan	Rencana 2021 (000)	Rencana Perolehan (000)				
			2022	2023	2024	2025	2026
A.	APBN	288,665,917	264,671,423	226,857,582	231,251,716	234,586,093	237,741,857
1	Gaji dan Tunjangan PNS	156,429,815	161,243,290	154,247,320	158,641,454	161,975,831	165,131,595
2	BPPTNBI Solutjen Diktristek	58,323,946	72,610,262	72,610,262	72,610,262	72,610,262	72,610,262
3	Pinjaman (PHLN)	73,912,156	24,336,871	-	-	-	-
4	Insentif IKU dari Ditjen Diktristek		6,481,000				
B.	SELAIN APBN	790,797,381	748,903,488	586,198,666	587,912,763	618,846,616	690,268,937
1	Dana Masyarakat	29,109,512	29,691,702	30,285,536	31,194,102	32,129,925	33,093,823
2	Biaya Pendidikan	336,408,224	343,136,387	360,293,207	385,307,867	416,138,654	457,752,519
3	Pengelolaan Dana Abadi						
4	Usaha UM	-	3,191,913	3,511,104	3,862,214	4,248,436	4,673,279
5	Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi	43,505,272	44,375,377	45,262,884	46,620,771	48,019,394	49,459,976
6	Pengelolaan Kekayaan UM	15,926,312	16,244,837	16,569,734	17,569,734	18,569,734	19,569,734
7	APBD	-	-	-	-	-	-
8	Pinjaman	-	-	-	-	-	-
9	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLPA) Akhir TA-1	365,448,061	311,863,272	130,276,201	103,358,075	99,740,473	125,719,606
Total Rencana Perolehan		1,079,063,298	1,013,174,911	813,056,248	819,164,479	853,432,709	928,010,794

D. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan rangka pemenuhan kebutuhan anggaran pada setiap sasaran strategis kurun waktu tahun 2022—2026 disajikan dalam Rencana Pembiayaan dan dipaparkan pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.4 Rencana Pembiayaan Tahun 2022—2026

Komponen Biaya	Rencana Biaya 2021 (.000)	Total Biaya (.000)				
		2022	2023	2024	2025	2026
E.1.1 BIAYA (GAJI DAN TUNJANGAN PNS)	156,429,815	161,243,290	153,953,560	158,333,007	161,651,961	164,791,530
1. BIAYADOSENPNS	121,612,812	123,269,397	121,416,604	126,119,424	130,078,657	134,159,436
A. Gaji dan Tunjangan		68,082,461	67,808,439	71,194,706	74,750,286	78,483,645
B. Tunjangan Profesi		36,592,204	34,060,836	34,742,053	34,742,053	35,089,473
C. Tunjangan Kehormatan		12,461,436	12,706,711	13,342,047	13,608,888	13,608,888
D. Uang Makan		6,133,296	6,840,618	6,840,618	6,977,430	6,977,430
2. BIAYATENAGAKEPENDIDIKANPNS	34,817,003	37,973,893	32,536,956	32,213,583	31,573,304	30,632,094
A. Gaji dan Tunjangan		32,707,189	28,726,428	28,441,160	27,876,330	27,046,029
B. Uang Makan		5,266,704	3,810,528	3,772,423	3,696,974	3,586,065
E.1.2 BIAYA (BPPTNBHDARISETDITJEN DIKTIRISTEK)	58,323,946	72,610,262	72,010,262	72,010,262	72,010,262	72,010,262
1. OPERASIONAL	31,697,584	20,607,085	23,024,460	23,024,460	23,024,460	23,024,460
A. Pendidikan		603,200	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
B. Manajemen		20,003,885	22,024,460	22,024,460	22,024,460	22,024,460
2. BIAYADOSENNONPNS	20,095,470	8,689,860	8,936,012	8,936,012	8,936,012	8,936,012
A. Gaji dan Tunjangan		7,331,220	7,433,408	7,432,058	7,430,708	7,429,358
B. Tunjangan Kehormatan			8,100	9,450	10,800	12,150
C. Uang Makan		1,358,640	1,494,504	1,494,504	1,494,504	1,494,504
3. BIAYATENAGAKEPENDIDIKANNONPNS		30,313,317	27,649,790	27,649,790	27,649,790	27,649,790
A. Gaji dan Tunjangan		19,550,917	16,834,350	16,834,350	16,834,350	16,834,350
B. Uang Makan		3,962,400	4,015,440	4,015,440	4,015,440	4,015,440
C. Tunjangan Kinerja		6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000
4. INVESTASI	5,257,459	13,000,000	12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,400,000
A. Pembangunan/ Perbaikan Gedung dan Bangunan		-	6,110,000	6,110,000	6,110,000	6,110,000
B. Pengadaan Peralatan dan Mesin		13,000,000	6,290,000	6,290,000	6,290,000	6,290,000
5. PENGEMBANGAN	1,273,433	-	-	-	-	-
A. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	1,273,433					
E.1.4 BIAYA (PINJAMAN)	73,912,156	24,336,871	-	-	-	-
INVESTASI (PHLN/SBSN/KPBU)		24,336,871				
A. Pelaksanaan PHLN di PIUUM		24,336,871				
E.1.5 INSENTIFIKUDARI DITJENDIKTIRISTEK		6,481,000	-	-	-	-
A. Operasional		1,100,000				
B. Investasi		3,151,000				
C. Pengembangan		2,230,000				
E.1.5. BIAYA (SELAIN APBN)	478,334,109	618,227,287	483,734,351	489,080,737	494,050,880	499,153,029
1. OPERASIONAL	205,302,453	288,412,978	228,219,900	231,868,000	234,711,000	237,630,000
A. Pendidikan		84,266,062	85,108,000	86,794,000	87,636,000	88,513,000
B. Penelitian		54,300,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000

Komponen Biaya	Realisasi Biaya 2024 (.000)	Total Biaya (.000)				
		2023	2023	2024	2025	2026
C. Pengabdian kepada Masyarakat		9,687,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
D. Manajemen		140,159,916	98,111,900	100,074,000	102,075,000	104,117,000
4. INVESTASI	154,118,816	168,846,000	94,136,460	95,015,380	96,732,840	98,489,918
A. Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		149,800,000	74,900,000	75,398,000	76,925,000	78,484,000
B. Pengadaan Peralatan dan Mesin		19,046,000	19,236,460	19,617,380	19,807,840	20,005,918
5. PENGEMBANGAN	2,288,033	40,968,309	41,377,991	42,197,357	42,607,040	43,033,111
A. Keilmuan/Keahlian Dosen dan Tenaga Kependidikan		10,768,294	10,875,976	11,091,342	11,199,025	11,311,016
B. Pengembangan yang Merupakan Penugasan dari Pemerintah	-	30,200,015	30,502,015	31,106,015	31,408,015	31,722,095
6. REMUNERASI	116,824,807	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
Grand Total (Biaya Gap dan Tunjangan PNS-BPP/NIH-Alokasi dan Instruksi lain-Pinjaman-Selain APBD)	767,200,026	882,898,710	709,698,173	719,424,006	727,713,103	735,954,821

Tabel 4.4 Rencana Pembiayaan Setiap Sasaran Strategis Tahun 2022—2026

No	INDIKATOR/INPELA	SATUAN	HASIL- TAMBAH	TARGET/INPELA A						ALOKASI/RENCANA					
				2022	2023	2024	2025	2026		2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Sasaran Strategis 1 (Akademi/akarya Kualitas Pembelajaran dan Pembelajaran)									141.308.282	177.778.415	179.967.609	186.356.426	200.093.671	208.051.490
	Babak Pengembangan Penguasaan dan Penguasaan									141.308.282	177.778.415	179.967.609	186.356.426	200.093.671	208.051.450
1	Persentase prodi yang memiliki kinerja *)	%	46,48	100	100	100	100	100							
2	Persentase mata kuliah SI dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran percobaan kasus (case method) atau pembelajaran kekompetik berbasisprojek (team- based project) sebagai sebagian beberapa *)	%	42,40	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00							
3	Persentase program studi SI dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah dan masih berlaku pada tahun berjalan *)	%	18,57	24,29	50,00	55,00	60,00	65,00							
4	Persentase program studi yang memiliki akreditasi A atau unggul	%	62,5	65	67,5	70	72,5	75							
5	Jumlah program studi baru yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja nasional dan global	prodi	0	5	10	14	18	23							
6	Jumlah aktif dosen Sekolah yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja nasional dan global	Fakultas Sekolah	9	10	10	11	11	11							

No.	INDIKATOR INISIA	SATUAN	BASE- LINE	TARGET INISIB						ALOKASI (Rp.000.000)					
				2022	2023	2024	2025	2026		2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Kualitas Mahasiswa (Lulusan)									27.181,108	27.556,908	27.556,908	27.556,908	27.556,908	27.556,908
	Bidang / Program Studi Kemampuan dan Kemampuan									27.181,108	27.556,908	27.556,908	27.556,908	27.556,908	27.556,908
1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang langsung berkerja *)	%	22,10	29,10	36,15	49,39	49,39	49,39							
2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang melanjutkan studi *)	%	8,63	10,84	12,45	16,33	16,33	16,33							
3	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menjadi wirausaha *)	%	8,70	10,06	11,30	14,29	14,29	14,29							
4	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang memperoleh patung sekitar 20 (dua puluh) aks di luar kampus *)	%	10,71	16,5	21	25,5	30	34,5							
5	Persentase mahasiswa yang memiliki prestasi paling rendah tingkat nasional *)	%	4,02	4,5	5	5,5	6	6,5							
6	Jumlah prestasi dan rekognisi mahasiswa paling rendah tingkat nasional *)	prestasi/ rekognisi	2500	2600	2700	2800	2900	3000							
7	Persentase lulusan berorientasi kompetensi dan profesi	%	17,35	24,5	38,75	45,5	52,25	60,5							
8	IPK lulusan	IPK	3,48	3,49	3,50	3,51	3,52	3,53							
9	Jumlah mahasiswa asing (program gelar)	orang	41	170	250	300	325	350							
10	Jumlah mahasiswa asing (program non gelar)	orang	1929	1100	1200	1300	1400	1500							
11	Jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan mahasiswa outbound ke PT	mahasiswa	350	358	361	364	367	370							

NO	INDIKATOR/INR/A	SATUAN	BASE- LINE	TARGET/INR/A						ALOKASI/Rp200.000					
				2022	2023	2024	2025	2026		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	luar negeri pada tahun berjalan														
12	Rasio mahasiswa program Diploma dan Sarjana terhadap mahasiswa program Magister dan Doktorat	ratio	8 : 1	8 : 1,2	8 : 1,4	8 : 1,6	8 : 1,8	8 : 2							
13	Persentase mahasiswa penerima beasiswa	%	20	20	20	20	20	20							
14	Jumlah cabang IKA	cabang	40	60	80	100	110	120							
15	Jumlah Perusahaan yang berpartisipasi dalam job fair	perusahaan	15	20	25	30	35	40							
C	Sesuai Sasaran, 1 (Kategori A) dan 2 (Kategori B) dan 3 (Kategori C) dan 4 (Kategori D) dan 5 (Kategori E) dan 6 (Kategori F) dan 7 (Kategori G) dan 8 (Kategori H) dan 9 (Kategori I) dan 10 (Kategori J)									50.000.000	65.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
	Indikator Pencapaian Kinerja dan Inovasi									47.228.000	54.300.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
1	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks selain WoS atau Scopus pada tahun berjalan	judul	353	800	820	840	860	880							
2	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks WoS atau Scopus pada tahun berjalan	judul	133	200	225	250	275	300							
3	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding internasional terindeks Scopus pada tahun berjalan	judul	542	800	815	820	825	830							
4	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding internasional	judul	680	700	705	710	715	720							

NO	INDICATOR/NERIA	SATUAN	BASE- LINE ¹	TARGET/NERIA						REALISASI/NERIA					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	terindeksedisi WoS dan Scopus pada tahun berjalan.														
5	Jumlah huraian penelitian berupa karya terapan atau karya seni pada tahun berjalan	judul	350	600	605	610	615	620							
6	Jumlah dosen yang aktif melakukan kegiatan tripartita di lingkungan UINM pada tahun berjalan	dosen	39	42	50	70	90	100							
7	Rerata nilai Scopus tiga tahun terakhir dosen	rasio	7,33	7,53	7,73	7,93	8,13	8,33							
8	Rerata nilai Scopus tiga tahun terakhir per artikel	rasio	1,85	2,00	2,15	2,30	2,50	2,90							
9	Jumlah publikasi karya ilmiah terindeks Scopus yang dihasilkan dari kolaborasi dengan peneliti asing pada tahun berjalan	judul	150	160	170	180	190	200							
10	Jumlah kegiatan penelitian (jumlah) yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau terakreditasi oleh masyarakat per jumlah dosen*)	rasio	5 : 1	5,01 : 1	5,1 : 1	5,15 : 1	5,25 : 1	5,5 : 1							
11	Jumlah produk inovasi atau prototype inovasi yang dihasilkan pada tahun berjalan	produk	5	6	7	8	9	10							
12	Rasio jumlah dosen dan jumlah judul kegiatan penelitian yang dilaksanakan pada tahun berjalan	rasio	1 : 1,5	1 : 1,6	1 : 1,7	1 : 1,8	1 : 1,9	1 : 2							
13	Rasio jumlah dosen dan jumlah judul kegiatan penelitian karya	rasio	1 : 0,5	1 : 0,6	1 : 0,7	1 : 0,8	1 : 0,9	1 : 1							

NO	INDIKATOR/INDIKA	SATUAN	BASE- LINE 202	TARGET/INDICATOR						ALOKASI/REVENUE (Rp)					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan														
	Indikator Pengembangan Penelitian kepada mahasiswa									11.780.000	4.087.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
14	Jumlah penelitian dengan seluruh elemen mahasiswa dengan mitra dalam negeri maupun melaksanasi dengan mitra luar negeri	IA	975	1.000	1.025	1.050	1.075	1.100							
15	Jumlah penelitian kepada masyarakat yang dilaksanakan atas integrasi program pendidikan dan penelitian	kegiatan	n.a	100	150	200	250	300							
16	Jumlah publikasi hasil penelitian kepada masyarakat	artikel	684	700	750	800	850	900							
17	Jumlah kelulusan penelitian (komunitas) kepada masyarakat yang berhasil mendapat recognition internasional atau dipublikasikan masyarakat per jumlah dosen *)	rasio	2 : 1	2.01 : 1	2.1 : 1	2.15 : 1	2.25 : 1	2.5 : 1							
18	Jumlah human publication kepada masyarakat berupa karya ilmiah yang terakreditasi	karya	150	200	205	210	215	220							
19	Sesuai Strategi 1 (Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan)									530.290.840	613.378.297	437.173.590	460.510.382	455.062.434	458.348.173
	Indikator Pengembangan Organisasi dan Tata Kelola									1.18.092.470	1.661.653.801	1.261.156.360	1.222.098.460	1.241.090.460	1.250.141.160
1	Jumlah Dokumen Perencanaan	dokumen	n.a	20	35	70	100	150							

No.	INDIKATOR/INISIA	SATUAN	BASE LINE	TARUHI TRINIRU A						BASELINE	ALUKASIDIPRINTU					
				2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Jumlah dokumen Peraturan MIVA	dokumen	n.a	8	12	15	17	20								
3	Jumlah dokumen Peraturan SAU	dokumen	n.a	2	3	4	5	6								
4	Jumlah aplikasi sistem informasi dan koordinasi perencanaan integratif berbasis AI	aplikasi	n.a	1	1	1	1	1								
5	Jumlah dokumen rencana strategis dasar penelitian kecerdasan buatan untuk kerja	dokumen	11	11	12	12	13	13								
6	Laporan akuntabilitas	dokumen	1	1	1	1	1	1								
8	Jumlah program kegiatan per SDGs	kegiatan	n.a	2	3	4	5	6								
9	Jumlah kerja sama dengan perguruan tinggi yang masuk dalam Top 100 QSWU/Relig Subjects	kerja sama (MOA)	16	25	35	45	55	65								
10	Jumlah mitra DUK yang memiliki perjanjian kerjasama yang menghasilkan skripsi akhir tahun berjalan	instansi	108	125	130	131	132	133								
11	Jumlah mitra instansi luar negeri yang memiliki perjanjian kerjasama yang menghasilkan skripsi akhir tahun berjalan	instansi	22	25	35	45	55	65								
12	Jumlah mitra kementerian/ lembaga pemerintah dan pendu yang memiliki perjanjian kerjasama yang menghasilkan skripsi pada tahun berjalan	instansi	54	125	150	155	160	165								
13	Jumlah mitra perguruan tinggi yang memiliki	instansi	58	60	62	64	66	68								

No	INDIKATOR/INERVA	SATUAN	BASIS L1, M1, B1	TARUJIKINERVA						ALOKASI (Rp.000.000)					
				2022	2023	2024	2025	2026		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	tridharman di lingkungan UM podharman bejalan														
	Indikator Keberhasilan Sumbat Daya Keuangan									5.100.000	5.600.800	5.601.800	5.601.800	5.601.800	5.601.800
30	Opini KAP dan laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
31	Persentase implementasi sistem keuangan yang terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	%	30	80	90	100	100	100							
32	Persentase implementasi sistem pengarsipan, arsip dan audit keuangan dan aset yang terintegrasi	%	20	50	60	80	100	100							
33	Persentase kualitas tidak lajur temuan BPK	%	100	100	100	100	100	100							
34	Jumlah pendapatan Non APBN	milyar rupiah	424,95	436,64	455,92	484,56	519,11	564,55							
	Indikator Keberhasilan Infrastruktur Epodharman dan Kerangka									235.288.431	207.107.243	104.309.802	105.186.252	106.000.212	108.603.290
35	Persentase implementasi sistem pengelolaan aset dan infrastruktur yang terintegrasi	%	20	50	60	80	100	100							
36	UJI Green Metric rank		26	23	20	18	16	15							
37	Nilai rupiah pendapatan unit kerja UM yang bersumber dari hasil kerjasama dengan unit bisnis UM atau instansi swasta/industri.	milyar rupiah	43,51	44,38	45,26	46,62	48,02	49,46							

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Universitas Negeri Malang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Berbasis Akrua yang diakomodir dengan aplikasi di Sakti pada modul GL dan Pelaporan dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara diakomodir dengan aplikasi di Sakti pada modul aset dan persediaan. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari

1. Laporan Realisasi Anggaran, terdiri dari Pendapatan Negara, Belanja Negara dan Pembiayaan.
2. Neraca, disusun berdasarkan posisi keuangan yang terdapat pada satuan kerja.
3. Laporan Operasional, disusun berdasarkan data pendapatan LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, dan surplus/defisit pos luar biasa yang selanjutnya diperhitungkan nilainya untuk menghasilkan surplus/defisit LO.
4. Laporan Perubahan Ekuitas, disusun berdasarkan nilai ekuitas awal pada tahun anggaran berjalan, surplus/defisit LO yang berasal dari hasil akhir laporan operasional TA berjalan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang diperhitungkan untuk menghasilkan nilai ekuitas akhir yang akan disajikan di neraca.
5. Catatan atas Laporan Keuangan, menyajikan informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi serta penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, LPE, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sedangkan Sakti Modul Aset dan Persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3 Basis Akuntansi

Universitas Negeri Malang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual

adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setaraka diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkansetiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Universitas Negeri Malang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesarnilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Universitas Negeri Malang telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar- dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakankebijakan yang diterapkan oleh Universitas Negeri Malang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Universitas Negeri Malang adalah sebagai berikut:

Kebijakan
Akuntansi
atas
Pendapatan-
LRA

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Kebijakan
Akuntansi
atas
Pendapatan-
LO

(2) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Universitas Negeri Malang adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan APBN diakui pada saat pengeluaran realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja yang berasal dari pagu DIPA Rupiah Murni. Pendapatan dari alokasi APBN - DIPA RM diukur sebesar nilai realisasi belanja sesuai dengan SPM/SP2D Belanja yang berasal dari pagu DIPA rupiah murni.
 - Pendapatan PNBPN diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih sesuai dengan dokumen tagihan atau yang dipersamakan dan/atau diakui pada saat realisasi pendapatan secara hak telah diterima tanpa didahului adanya penagihan sehubungan dengan adanya penyerahan layanan atau manfaat ekonomi kepada mitra layanan atau masyarakat.

(3) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

*Kebijakan
Akuntansi
atas
Belanja*

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui mekanisme uang persediaan (UP), pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Kebijakan Akuntansi atas Beban

*Kebijakan
Akuntansi
atas Beban*

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beban disajikan dalam LO entitas.

(5) Kebijakan Akuntansi atas Aset

*Kebijakan
Akuntansi
Atas Aset*

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomidan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang (rupiah), termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pada tahun 2022 Universitas Negeri Malang telah berubah status menjadi PTN BH sehingga asetnya telah dipisahkan dari kekayaan negara. Oleh karena itu Universitas Negeri Malang tidak menyajikan lagi nilai aset tetap pada laporan keuangan SAP.

(6) Kewajiban

Kebijakan
Akuntansi
Atas
Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi Pemerintah dan masa pembayaran/pelunasannya diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi antara lain Utang Pihak Ketiga dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdiri dari:
(1) Pendapatan Diterima di Muka;
(2) Utang Biaya; dan (3) Kewajiban pada Pihak Lain.
- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan Pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Kebijakan
Akuntansi
Atas
Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah. Dalam Basis Akrua, Pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Dalam Pelaksanaan Anggaran Universitas Negeri Malang mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan nomor: SP DIPA-139.03.2.693445/2025 dengan pagu senilai Rp161.732.881.000,-. Selama periode berjalan Universitas Negeri Malang belum pernah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Perubahan DIPA berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Pendapatan Lain-lain		
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	161.732.881.000	-
Belanja Barang	-	-
Belanja Modal	-	-
Belanja Sosial		
Jumlah Belanja	161.732.881.000	-

B. 1 Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp58.731.368,- atau mencapai 0 persen dari target pendapatan TA 2025 sebesar Rp0,-. Realisasi Pendapatan berasal dari Pendapatan PNBPN sebesar Rp58.731.368,-.

Realisasi Belanja pada TA 2025 sebesar Rp88.858.403.279,- atau 54.94 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA TA 2025 sebesar Rp161.732.881.000,-. Realisasi belanja Universitas Negeri Malang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp88.858.403.279,-. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp0,- dan Belanja Modal sebesar Rp0,-.

Berdasarkan realisasi pendapatan sebesar Rp58.731.368,- dan realisasi belanja sebesar Rp88.858.403.279,-, maka defisit anggaran pada TA 2025 sebesar Rp(88.799.671.911),-.

B. 2 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp58.731.368,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp58.731.368,- dan Rp0,-. Pendapatan Universitas Negeri Malang terdiri dari Pendapatan PNBPN Lainnya. Rincian realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Kenaiikan/Penurunan
Pendapatan PNBPN Lainnya	58.731.368	-	
JUMLAH	58.731.368	-	

B.2.1 Pendapatan PNBP Lainnya

Realisasi Merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh satuan kerja non-BLU yaitu satuan kerja
Pendapatan PNBP dan non PNBP. Pendapatan PNBP Lainnya untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025
PNBP dan 2024 adalah Rp58.731.368,- dan Rp0,- dengan rincian sebagai berikut:

Lainnya

Rp58.731.368,-

-

*Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya untuk
periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024*

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Kenaikan/ Penurunan
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TA lalu	3.751.368	-	
Penerimaan Kembali Belanja Barang TA lalu	54.980.000	-	
Jumlah	58.731.368	-	

B.3 Belanja

Realisasi Realisasi Belanja instansi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah
Belanja sebesar Rp88.858.403.279,- dan Rp0,- Belanja Universitas Negeri Malang terdiri dari belanja
Negara pegawai.

Rp88.858.403

.279,-

Rincian realisasi belanja adalah sebagai berikut:

*Realisasi Belanja untuk
periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024*

Jenis Belanja	30 Juni 2025			30 Juni 2024	% Naik/Turun
	Anggaran	Realisasi (Netto)	%		
Belanja Pegawai	161.732.881.000	88.858.403.279	54,94	-	
JUMLAH	161.732.881.000	88.858.403.279	54,94%	-	

B.3.1 Belanja Pegawai

Belanja Belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan
Pegawai kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan
 diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar
 negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung
 tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang
 berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp88.858.403.279,- dan Rp0,-. Belanja
 pegawai terdiri dari belanja gaji dan tunjangan PNS, belanja gaji dan tunjangan PPPK dan
 uang makan pegawai. Adapun rincian belanja pegawai disajikan dalam table dibawah ini:

*Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada
30 Juni 2025 dan 2024*

URAIAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	KENAIKAN/PENURUNAN
Belanja Gaji Induk PNS	57.947.574.359	-	
Belanja Tunjangan Profesi Dosen PNS	16.057.237.400	-	
Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor PNS	9.095.801.000	-	
Belanja Uang Makan PNS	4.592.149.000	-	
Belanja Gaji Induk PPPK	952.803.520	-	
Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	105.205.000	-	
Belanja Uang Makan PPPK	107.633.000	-	
JUMLAH	88.858.403.279	-	

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan
Pajak Rp0,-*

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan periode pelaporan. Nilai Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,- dan Rp0,- Adapun rincian Piutang Bukan Pajak pada lingkup Universitas Negeri Malang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2025	31 Desember 2024	%NAIK (TURUN)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TA Yang Lalu	-	-	
Jumlah	-	-	

Piutang ini merupakan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu melalui mekanisme pemotongan langsung melalui SPM dan sampai dengan periode pelaporan belum terbit SP2D.

C.2. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp7.136.376.068,-*

Utang kepada pihak ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp7.136.376.068,- dan Rp0,- Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Universitas Negeri Malang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2025	31 Desember 2024	%NAIK (TURUN)
Beban Gaji Induk PNS Bulan Juli 2025	7.015.932.098	-	
Beban Gaji Induk PPPK Bulan Juli 2025	120.443.970	-	
Jumlah	7.136.376.068	-	

C.3. Ekuitas

Ekuitas

Rp(7.136.376.068

),-

Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp(7.136.376.068),- dan Rp0,-. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 Pendapatan Operasional**

*Pendapatan
Operasional
Rp0,-*

Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian pendapatan LO per 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	%NAIK (TURUN)
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	-	
Jumlah	-	-	-

D.2 Beban Operasional

*Beban
Operasional
Rp95.238.644.347,-*

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Jumlah beban pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp95.238.644.347,- dan Rp0,-. Beban tersebut terdiri dari:

Rincian Beban Operasional pada 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	%NAIK (TURUN)
Beban Pegawai	95.238.644.347	-	
Jumlah	95.238.644.347	-	

D.2.1 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp95.238.644.347,-*

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang bukan berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud. Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp95.238.644.347,- dan Rp0,-. Beban tersebut terdiri dari:

Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	%NAIK (TURUN)
Beban Gaji Induk PNS	64.963.506.457	-	
Beban Tunjangan Profesi Dosen PNS	16.057.237.400	-	
Beban Kehormatan Profesor PNS	9.095.801.000	-	
Beban Uang makan PNS	3.854.070.000	-	
Beban Gaji Induk PPPK	1.073.247.490	-	
Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	105.205.000	-	
Beban Uang makan PPPK	89.577.000	-	
Jumlah	95.238.644.347	-	

D.3 Kegiatan Non Operasional

*Kegiatan Non
Operasional
Rp58.731.368,-*

Pos Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp58.731.368,- dan Rp0,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada
30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	%NAIK (TURUN)
Pendapatan Kegiatan Non Operasional lainnya	58.731.368	-	
Jumlah	58.731.368	-	

D.3.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Pendapatan
dari Kegiatan
Non
Operasional
Lainnya
Rp58.731.368,-*

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp58.731.368,- dan Rp0,-. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu.

Rincian Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada
30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	%NAIK (TURUN)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TA Yang Lalu	3.751.368	-	
Penerimaan Kembali Belanja Barang TA Yang Lalu	54.980.000	-	
Jumlah	58.731.368	-	

Pengembalian belanja barang TA yang lalu merupakan pengembalian dari kegiatan SBMPTN tahun 2018 dari temuan BPK RI.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp0,-

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah Rp0,-. Ekuitas awal tahun 2024 merupakan saldo ekuitas pada 31 Desember 2024.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Surplus/Defisit-
LO
Rp(95.179.912.97
9),-

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(95.179.912.979),- dan Rp0,-. Surplus LO merupakan selisih tambah antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi Yang
Menambah/Mengu
rangi Ekuitas
Rp0,-

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas terdiri dari Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, dan Koreksi Lain-lain. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar
entitas
Rp88.043.536.911
-

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp88.043.536.911,- dan Rp0,-. Pada bulan Juni 2025 terjadi transfer masuk sebesar Rp756.135.000 dari Satker Universitas Negeri Malang kode Satker 690535 yang berada pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang dikarenakan adanya perubahan nomenklatur sehingga dilakukan likuidasi.

E.9. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp(7.136.376.068)
-

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp(7.136.376.068),- dan Rp0,-. Nilai ekuitas akhir didapatkan dari ekuitas awal ditambah dengan surplus/defisit LO, koreksi periode berjalan dan transaksi antar entitas.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Sampai dengan akhir periode pelaporan tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pada Tahun 2022 secara resmi Universitas Negeri Malang berubah status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6738).

Universitas Negeri Malang (UM) dalam tahun 2025 menerima Pagu Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan UU No.62 Tahun 2024 di tuangkan dalam DIPA Nomor SP DIPA-139.03.2.693445/2025, tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp161.732.881.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. DIPA tersebut sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan revisi.

Berdasarkan SK Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2497/MPK.A/KU.00.00/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Universitas Negeri Malang dan SK Rektor Nomor 2.1.13/UN32/KP/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Satker Ditjen Dikti PTNBH Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2025, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Pada Universitas Negeri Malang (UM). Adapun nama nama Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Prof. Dr. Hariyono, M.Pd
Pejabat Penanda tangan SPM	: Titin Sulistinah, S.E
Pejabat Pembuat Komitmen	: Hardi Sona Kurniawan, S.Kom.,M.M
Bendahara Pengeluaran	: Wahyuni Hidayah, A.Md

G. CAPAIAN RINCIAN OUTPUT

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian/Lembaga : (139) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Satuan Kerja : DIKTI (PTN BH -
Fungsi : (10) PENDIDIKAN
Sub Fungsi : (06) PENDIDIKAN TINGGI
Program : 139.03.WA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
Lokasi : MALANG

Kode	Kegiatan	Belanja		%	Keluaran			Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Target	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
139.03.WA	Program Dukungan Manajemen							
7734	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	161.732.881.000	88.858.406.923	54,94%	1	-	Layanan	54,94%
	Subtotal	161.732.881.000	88.858.406.923	54,94%	1	-	Layanan	54,94%
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll.)*	-	3.644					
	Total	161.732.881.000	88.858.403.279	54,94%	1	-	Layanan	54,94%

*Keterangan: Penyesuaian dijelaskan secara memadai di dalam Laporan Keuangan

Pengembalian belanja pada semester I 2025 merupakan pengembalian belanja melalui penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Untuk realisasi capaian output sebesar 0 layanan akan tercapai pada akhir periode pelaporan capaian output yaitu di Bulan Desember 2025.



Lampiran



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 693445
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	161,732,881,000	161,732,881,000	0
2	Belanja	88,858,406,923	88,858,406,923	0
3	Pengembalian Belanja	-3,644	-3,644	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	58,731,368	58,731,368	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21-JUL-25



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA-139.03.2.693445/2025

A. Dasar Hukum :

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara/Lembaga : (139) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
3. Provinsi : (05) JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Saklar : (693445) DITJEN DIKTI (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI MALANG)
Sebesar :Rp. 161.732.881.000,00 (Seratus Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Desapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

10 PENDIDIKAN

10.06 PENDIDIKAN TINGGI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

139.03.WA Program Dukungan Minumjemen

139.03.WA.7734 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dijen Pendidikan Tinggi

C. Sumber Dana Berasal Dari:

1. Rupaiah Murni

2. PNBP

PNBP TA Berjalan

Rp. 161.732.881.000,00

4. Penjamin-Hibah Dalam Negeri

- Penjamin Dalam Negeri

- Hibah Dalam Negeri

5. Hibah Langsung

- Hibah Luar Negeri Langsung

- Hibah Dalam Negeri Langsung

6. SBSP PSS

Rp. 161.732.881.000,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA-139.03.2.993445/2025

I A. INFORMASI KINERJA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

JAWA TIMUR

DITJEN DIKTI (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI MALANG)

Kementerian Negara/Lembaga : (139)

Unit Organisasi : (03)

Provinsi : (05)

Kode / Nama Saker : (693445)

Jakarta, 2 Desember 2024

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

mel.

SATRYO SOEMANTRI BRODOJONEGORO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-139.03.2.693445/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara / Lembaga : (139) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode / Nama Subsat : (693445) DITJEN DIKTI (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI MALANG)
Kawenangan : (KD) KANTOR DAERAH

Halaman 2.1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN BATAS PROGRAM AKTIVITAS / SUMBER DANA	REKAPITULASI					LOKASI NPPN	CARA PENYERAPAN REKAPITULASI
		PEMANA (1)	BUDANG (2)	MODAL (3)	BANTUAN SOSIAL (4)	LAKSIAN (5)	JUMLAH SELURUH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
653445	DITJEN DIKTI (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI MALANG)	181.732.881,00	-	-	-	-	181.732.881,00	
129.03.005	Program Dukungan Manajemen	181.732.881,00	-	-	-	-	181.732.881,00	
7734	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	181.732.881,00	-	-	-	-	181.732.881,00	
7734.836	Ditjen Pendidikan Tinggi	181.732.881,00	-	-	-	-	181.732.881,00	(05.53)
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	-	-	-	-	-	-	
	(05.53 JAWA TIMUR / KOTA MALANG)	-	-	-	-	-	-	
01	RM	181.732.881,00	-	-	-	-	181.732.881,00	RM
	JUMLAH	181.732.881,00	-	-	-	-	181.732.881,00	

Jakarta, 2 Desember 2024
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

td.

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-139.03.2.693445/2025
IV A B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [139] KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode / Nama Subsat : [03445] DT/JEN DIKT (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI MALANG)

Halaman : IV A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N

Jakarta, 2 Desember 2024
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN

tel.

SATRYO SOEMANTRI BRIDJONEGORO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-130.03.2.693445/2025
IV B. C A T A T A N

Kementerian Negara / Lembaga : [139] KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : [003] DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Provinsi : [003] JAWA TIMUR
Kode / Nama Satuan : [093445] DIT.JEN DIKT (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI MALANG)

Halaman : IV B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N

Jakarta, 3 Desember 2024
MENTRI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN

BATHO SOEMASTRI BRUDJONEGORO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI 139
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 03
SATUAN KERJA : DITJEN DIKTI (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI MALANG) 693445

Tgl Data : 22/07/25 7:05 AM
Tgl Cetak : 22/07/25 12:44 PM
Halaman : 1
lap_ira_face_satker_new_poc



URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah								
I. Pendapatan Perpajakan								
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak								
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah								
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)								
B. Belanja Negara								
I. Belanja Pemerintah Pusat								
1. Belanja Pegawai	161,732,881,000	88,856,403,279	(72,874,477,721)	54.94	0	0	0	0
2. Belanja Barang	161,732,881,000	88,856,403,279	(72,874,477,721)	54.94	0	0	0	0
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah								
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI 139
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 03
SATUAN KERJA : DITJEN DIKTI (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI MALANG) 693445

Tgl Data : 22/07/25 7:05 AM
Tgl Cetak : 22/07/25 12:44 PM
Halaman : 2
lap_fra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	161,732,881,000	88,868,403,279	(72,874,477,721)	54.94	0	0	0	0
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (139) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
 UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
 WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
 SATUAN KERJA : (693445) DITJEN DIKTI (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI MALANG)

Tgl Data : 22/07/25 7:05 AM
 Tgl Cetak : 22/07/25 12:44 PM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5

KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	7,136,376,068	0	7,136,376,068	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7,136,376,068	0	7,136,376,068	
JUMLAH KEWAJIBAN	7,136,376,068	0	7,136,376,068	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	(7,136,376,068)	0	(7,136,376,068)	0.00
JUMLAH EKUITAS	(7,136,376,068)	0	(7,136,376,068)	()
JUMLAH EKUITAS	(7,136,376,068)	0	(7,136,376,068)	()
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	0	0	

Keterangan :
 FINAL



MALANG, 22 Juli 2025

Pertanggung Jawab UAKPA
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (139) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
 UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
 WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
 SATUAN KERJA : (693445) DITJEN DIKTI (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI MALANG)

Prof. Dr. Hariyono, M.Pd
 NIP. 196312271988021001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2025
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (139) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
 ESELON I : (03) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
 WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
 SATUAN KERJA : (693445) DITJEN DIKTI (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI MALANG)

Tgl Data : 22/07/25 7:05 AM
 Tgl Cetak : 22/07/25 12:43 PM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	95,238,644,347	0	95,238,644,347	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	0	0	0	
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (139) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
ESELON I : (03) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (693445) DITJEN DIKT (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI MALANG)

Tgl Data : 22/07/25 7:05 AM
Tgl Cetak : 22/07/25 12:43 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	95,238,644,347	0	95,238,644,347	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(95,238,644,347)	0	(95,238,644,347)	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	58,731,368	0	58,731,368	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	58,731,368	0	58,731,368	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	58,731,368	0	58,731,368	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(95,179,912,979)	0	(95,179,912,979)	0
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(95,179,912,979)	0	(95,179,912,979)	0

Keterangan :

FINAL



MALANG, 22 Juli 2025

Tanggung Jawab UAKPA

REKREASI PENGGUNA ANGGARAN

Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

NIP. 196312271988021001

d

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (139) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (693445) DITJEN DIKTI (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI
MALANG)

Tgl Data : 22/07/25 6:27 AM
Tgl Cetak : 22/07/25 12:44 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(95,179,912,979)	0	(95,179,912,979)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	88,043,536,911	0	88,043,536,911	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(7,136,376,068)	0	(7,136,376,068)	0
EKUITAS AKHIR	(7,136,376,068)	0	(7,136,376,068)	0

Keterangan :

FINAL

MALANG, 22 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA
PENGGUNA ANGGARAN



Dr. Hariyono, M.Pd
NIP. 196312271988021001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 139
ESELON I : 03
WILAYAH/PROVINSI : 0500
SATUAN KERJA : 693445
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
JAWA TIMUR
DITJEN DIKTI (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI MALANG)

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 22/07/25 12:44 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 22/7/25 8:14 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			%	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
511	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	71,909,274,000	71,909,274,000	43,479,420,520	0	43,479,420,520	60.46	28,429,853,480
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	912,000	912,000	540,043	3,644	536,399	58.82	375,601
511121	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	5,714,583,000	5,714,583,000	3,428,767,880	0	3,428,767,880	60	2,285,815,120
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,217,645,000	1,217,645,000	708,978,253	0	708,978,253	58.23	508,666,747
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	10,696,520,000	10,696,520,000	6,576,394,000	0	6,576,394,000	61.48	4,120,126,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	670,246,000	670,246,000	1,166,014,827	0	1,166,014,827	173.97	(495,768,827)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3,404,249,000	3,404,249,000	2,016,462,480	0	2,016,462,480	59.23	1,387,786,520
511129	Belanja Uang Makan PNS	11,853,011,000	11,853,011,000	4,592,149,000	0	4,592,149,000	38.74	7,260,862,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	854,481,000	854,481,000	571,000,000	0	571,000,000	66.82	283,481,000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	35,337,419,000	35,337,419,000	16,057,237,400	0	16,057,237,400	45.44	19,280,181,600
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	18,402,189,000	18,402,189,000	9,095,801,000	0	9,095,801,000	49.43	9,306,388,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	160,080,629,000	160,080,629,000	87,692,765,403	3,644	87,692,761,759	54.79	72,387,867,241
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	210,729,000	210,729,000	105,205,000	0	105,205,000	49.92	105,524,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	210,729,000	210,729,000	105,205,000	0	105,205,000	49.92	105,524,000
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	853,566,000	853,566,000	747,626,550	0	747,626,550	87.59	105,939,450
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	16,000	16,000	12,302	0	12,302	76.89	3,698
511621	Belanja Tunjangan Suami/istri PPPK	61,581,000	61,581,000	55,999,926	0	55,999,926	90.94	5,581,074
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	14,348,000	14,348,000	13,417,792	0	13,417,792	93.52	930,208
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	117,900,000	117,900,000	93,381,250	0	93,381,250	79.2	24,518,750
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	46,640,000	46,640,000	42,365,700	0	42,365,700	90.84	4,274,300
511628	Belanja Uang Makan PPPK	167,832,000	167,832,000	107,633,000	0	107,633,000	64.13	60,199,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	1,261,883,000	1,261,883,000	1,060,436,520	0	1,060,436,520	84.04	201,446,480
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	199,640,000	199,640,000	0	0	0	0	199,640,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	199,640,000	199,640,000	0	0	0	0	199,640,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	161,732,861,000	161,732,861,000	88,858,406,923	3,644	88,858,403,279	54.94	72,874,477,721
	JUMLAH BELANJA	161,732,861,000	161,732,861,000	88,858,406,923	3,644	88,858,403,279	54.94	72,874,477,721

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 139
ESELON I : 03
WILAYAH/PROVINSI : 0500
SATUAN KERJA : 693445

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
JAWA TIMUR
DITJEN DIKTI (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI MALANG)

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 22/07/25 12:44 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_fra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	3,751,368	0	3,751,368	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	54,980,000	0	54,980,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	58,731,368	0	58,731,368	
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259					
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	58,731,368	0	58,731,368	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	58,731,368	0	58,731,368	

LAPORAN REALISASI KINERJA Tahun Anggaran 2025

Periode 4 & 6 bulan : 2025-06
 Kementerian Penguatan, Elemen 1 : 129 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI
 Wilayah Provinsi : 133.03 - DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
 Satuan Kerja : 05.53 - KOTA MALANG/JAWA TIMUR
 683445 - DIJEN DIKTI (PTN B) - UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Halaman : 1
 Tanggal Cetak : 23-07-2025

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
TD	PENDIDIKAN	161,732,861,000.00	88,898,406,923.00	54.94%							
DI	PENDIDIKAN TINGGI	161,732,861,000.00	88,898,406,923.00	54.94%							
DIK	Program Dukungan Manajemen	161,732,861,000.00	88,898,406,923.00	54.94%							
7734	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	161,732,861,000.00	88,898,406,923.00	54.94%							
80A	Layanan Dukungan Manajemen Internal	161,732,861,000.00	88,898,406,923.00	54.94%							
904	Layanan Pelaksanaan	161,732,861,000.00	88,898,406,923.00	54.94%	1.0000	Layanan	0.0000	54.94%	0%	(00)	Progres capaian ditinjau secara per Opemlisme sesuai dengan bulan yang sudah dihalai

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (139) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (693445) DITJEN DIKTI (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI MALANG)

Tgl Data : 22/07/25 6:27 AM

Tgl Cetak : 22/07/25 12:44 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	88,858,403,279
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	58,731,368	0
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,751,368
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	54,980,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	43,479,420,520	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	540,043	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	3,428,767,880	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	708,978,253	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	6,576,394,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,166,014,827	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	2,016,462,480	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	4,592,149,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	571,000,000	0
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	16,057,237,400	0
3.0	511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	9,095,801,000	0
3.0	511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	105,205,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	747,626,550	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	12,302	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	55,999,926	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	13,417,792	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	93,381,250	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	42,365,700	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	107,633,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	3,644
JUMLAH			88,917,138,291	88,917,138,291

Keterangan :

FINAL

MALANG, 22 Juli 2025

Menanggung Jawab UAKPA

SA PENGGUNA ANGGARAN

Dr. Hariyono, M.Pd
196312271988021001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2025
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (139) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
 UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
 WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
 SATUAN KERJA : (693445) DITJEN DIKTI (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI MALANG)

Tgl Data : 22/07/25 7:05 AM
 Tgl Cetak : 22/07/25 12:44 PM
 Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	7,136,376,068
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	88,858,403,279
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	58,731,368	0
0.0	313221	Transfer Masuk	756,135,000	0
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,751,368
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	54,980,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	48,822,596,810	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	601,061	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	3,851,515,830	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	796,444,283	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	7,384,490,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,202,917,173	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	2,264,211,300	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	3,854,070,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	640,730,000	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	16,057,237,400	0
3.0	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	9,095,801,000	0
3.0	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	105,205,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	842,127,750	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	13,812	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	63,083,836	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	15,116,062	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	105,181,250	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	47,724,780	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	89,577,000	0
JUMLAH			96,053,510,715	96,053,510,715

Keterangan :

FINAL



MALANG, 22 Juli 2025
 Penanggung Jawab UAKPA
 PENGGUNA ANGGARAN

Prof. Dr. Hariyono, M.Pd
 NIP. 196312271988021001

4

Selisih Pendapatan LRA dan LO
PER 30 JUNI 2025

No	Kode Akun	Nama Akun	Pendapatan LRA	Pendapatan LO			Selisih	Keterangan atas Selisih
				Pendapatan Operasional	Pendapatan Pelapasan Aset Non Lancar	Pendapatan Non Operasional		
	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3.751.368			3.751.368		
	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	54.980.000			54.980.000		
		Jumlah	58.731.368	-	-	58.731.368	-	

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025

Kode Sahar	Nama Sahar	Alum	Seban Pegawai	Uraian Jmla Beban	LRA Bebanja	LO (Beban)	Seluruh	Keterangan
690535	Diten Distrik (PTN BH - Universitas Negeri)							
511111			Seban Gaji Pokok PNS		43.479.420.520	43.479.420.520	(5.343.176.290)	Gaji Induk PNS Bulan Juli 2025
511119			Beban Pembulatan Gaji PNS		536.398	601.081	(64.662)	Gaji Induk PNS Bulan Juli 2025
511121			Beban Tunj. Suami/Istri PNS		3.428.767.880	3.451.515.830	(422.747.950)	Gaji Induk PNS Bulan Juli 2025
511122			Beban Tunj. Anak PNS		708.978.153	796.444.283	(87.466.030)	Gaji Induk PNS Bulan Juli 2025
511124			Beban Tunj. Fungsional PNS		6.576.394.000	7.384.490.000	(808.096.000)	Gaji Induk PNS Bulan Juli 2025
511125			Beban Tunj. PPh PNS		1.166.014.827	1.202.917.179	(36.902.344)	Gaji Induk PNS Bulan Juli 2025
511126			Beban Tunj. Beras PNS		2.016.462.480	2.264.211.300	(247.748.820)	Gaji Induk PNS Bulan Juli 2025
511129			Beban Uang Makan PNS		4.592.447.000	3.554.070.000	738.079.000	Pengurangan belanja uang makan PNS Bulan Desember 2024
511131			Beban Tunjangan Umum PNS		571.003.000	640.730.000	(69.730.000)	Gaji Induk PNS Bulan Juli 2025
511153			Beban Tunjangan Profesi Dosen		16.057.337.400	16.057.237.400	-	
511154			Beban Tunjangan Kehormatan Profesor		9.095.801.000	9.095.801.000	-	
5111521			Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS		105.205.000	105.205.000	-	
511611			Beban Gaji Pokok PPPK		747.624.550	842.127.750	(94.501.200)	Gaji Induk PPPK Bulan Juli 2025
511619			Beban Pembulatan Gaji PPPK		12.302	13.812	(1.510)	Gaji Induk PPPK Bulan Juli 2025
511621			Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK		55.999.926	63.083.896	(7.083.970)	Gaji Induk PPPK Bulan Juli 2025
511622			Beban Tunjangan Anak PPPK		13.417.792	15.116.062	(1.698.270)	Gaji Induk PPPK Bulan Juli 2025
511624			Beban Tunjangan Fungsional PPPK		91.381.250	105.181.250	(11.800.000)	Gaji Induk PPPK Bulan Juli 2025
511625			Beban Tunjangan Beras PPPK		42.365.700	47.734.780	(5.369.080)	Gaji Induk PPPK Bulan Juli 2025
511628			Beban Uang Makan PPPK		107.633.000	30.577.000	138.096.000	Pengurangan belanja uang makan PPPK Bulan Desember 2024
			Jumlah		88.858.403.279	95.238.644.347	(6.380.241.068)	
			Jumlah		88.858.403.279	95.238.644.347	(6.380.241.068)	

Pendapatan (LRA)
Untuk Periode yang berakhir 30 JUNI 2025

No.	KODE AKUN	KODE AKUN	URAIAN NAMA AKUN	PENDAPATAN (Rp)	PENJELASAN PENDAPATAN DETAIL
1	4259	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3.751.368	
2	4259	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	54.980.000	
			JUMLAH	58.731.368	

Jumlah Pendapatan =
LRA

Akun Pendapatan disesuaikan dengan akun pendapatan yang ada pada Laporan Pendapatan masing-masing Satker

*** Mohon dijelaskan secara informatif**